

Judul : Akhiri ketimpangan lahan, badan bank tanah bisa berperan nyata
Tanggal : Sabtu, 23 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Akhiri Ketimpangan Lahan Badan Bank Tanah Bisa Berperan Nyata



Aziz Subekti

ANGGOTA Komisi II DPR Aziz Subekti meminta pembenahan struktur kelembagaan dan transparansi kerja Badan Bank Tanah. Langkah itu diperlukan untuk mendorong reforma agraria yang berkeadilan di tengah ketimpangan penguasaan lahan yang masih kuat di masyarakat.

Aziz menjelaskan, Badan Bank Tanah berangkat dari janji politik Pilpres 2019 yang dieksekusi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Janji tersebut dinilai mulia karena menyentuh upaya negara mengakhiri ketimpangan penguasaan tanah, dari pihak yang menguasai ratusan hektare hingga warga yang tidak memiliki tanah sama sekali.

Ketimpangan penguasaan lahan, kata Aziz, masih menjadi persoalan nyata. Karena itu, Badan Bank Tanah harus berperan menghadirkan keadilan agraria. "Bukan sekadar melengkapi daftar lembaga di atas kertas dan kosong dari fungsi nyata," ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN, Selasa (19/5/2026).

Aziz juga mengingatkan filosofi dasar Badan Bank Tanah yang tidak boleh pasif

menunggu limpahan aset dari Kementerian ATR/BPN. Lembaga tersebut harus aktif dan produktif mengelola tanah negara. "Bank yang tidak bergerak akan pelan-pelan bangkrut, bahkan tutup," tegasnya.

Meski demikian, tanah yang dikelola Badan Bank Tanah tidak semestinya diperjualbelikan. Aset tanah negara harus dimanfaatkan secara produktif dalam periode tertentu, lalu dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas. "Tidak diperlakukan layaknya barang dagangan yang bebas berpindah tangan di pasar," ingatnya.

Lebih lanjut, Aziz mengkritik struktur organisasi Badan Bank Tanah yang dinilai belum ideal untuk memikul tanggung jawab besar reforma agraria. Dengan beban tersebut, struktur saat ini dinilai mewah, tetapi tidak aplikatif dalam menjalankan tugas secara efektif dan menyeluruh di lapangan.

Karena itu, Komisi II DPR diminta memperkuat fungsi pengawasan terhadap Badan Bank Tanah. Selain itu, pemanggilan komite terkait perlu dilakukan agar arah kebijakan reforma agraria lebih jelas dan dijalankan secara serius serta terukur, tidak sekadar berhenti pada pernyataan di rapat resmi.

Sejalan dengan itu, Aziz juga meminta keterbukaan data persoalan agraria di seluruh provinsi. Data tersebut harus dapat diakses publik agar masyarakat memahami masalah yang terjadi sekaligus solusi yang disiapkan pemerintah. "Bukan informasi setengah tertutup yang justru memicu kebingungan di lapangan," ucapnya. ■ **PYB**